

Politik Etis

1. Jelaskan latar belakang munculnya program Politik Etis!

Sistem Politik Balas Budi atau Sistem Politik Etis muncul pada tahun 1901 setelah waktu yang sangat lama Indonesia menderita akibat sistem tanam paksa. Latar belakang munculnya program ini adalah kemunculan pengusaha swasta yang umumnya kaum liberal di Indonesia. Prinsip Pintu Terbuka (open door policy) pada tahun 1870 memperbolehkan pengusaha asing menanamkan modal (contohnya dalam bentuk perkebunan kopi, teh, tebu ataupun pabrik gula, teh, kopi, dan lain-lain) di Indonesia. Bukti konkrit adanya pengusaha asing yang masuk ke Indonesia adalah Undang Agraria dan Undang-Undang Gula (*Suiker Wet*) yang dibuat pemerintah kolonial.

Kaum liberal, ketika melihat penderitaan yang dialami rakyat Indonesia akibat sistem tanam paksa pemerintah kolonial, menentang pemerintah kolonial dan memaksa pemerintah untuk menjalankan kewajibannya memajukan bangsa yang dijajah. Trias Van Deventer (Edukasi, Irigasi, Migrasi) yang menjadi semakin terkenal bahkan sampai mendapatkan perhatian dari pemerintah Belanda juga menjadi salah satu latar belakang. Akhirnya, tulisan Van Deventer ini disetujui oleh pemerintah Belanda sekaligus untuk menggenapkan pidato Ratu Wilhelmina, yang masih berusia 21 saat itu, pada tahun 1901 yaitu kewajiban untuk membalas budi pada negara jajahannya.

2. Carilah tujuan dibentuknya Politik Etis!

Seperti yang dituliskan pada latar belakang tentu tujuan pertama Politik Etis dibentuk adalah untuk memenuhi keinginan para liberal dan pengusaha asing di Indonesia. Kedua, adalah untuk menggenapkan tulisan Van Deventer dan pidato Ratu Wilhelmina, Ratu Belanda pada masa itu, yang memberikan pidato tentang kewajiban membalas budi terhadap negara jajahannya. Alasan lain dibentuknya Politik Etis pasti bisa dilihat dari penerapan Politik Etis yang sebenarnya.

Alasan pemerintah kolonial Belanda menerapkan Politik Etis adalah untuk meningkatkan kualitas SDM dan pengelolaan SDA Indonesia secukupnya saja demi meningkatkan keuntungan yang akan didapatkan pemerintah kolonial. Hal ini bisa dilihat dari berbagai metode penerapan Politik Etis, khususnya untuk tiga sektor utama Edukasi, Irigasi, dan Migrasi.

Dari sisi edukasi, umumnya edukasi dilakukan hanya untuk orang-orang Belanda dan orang-orang asing yang masuk ke Indonesia. Selain itu, edukasi juga diberikan pada orang-orang yang berdarah bangsawan. Edukasi ini dilakukan untuk orang-orang yang akan menjadi bagian dari pegawai negeri kolonial Belanda. Di sektor irigasi pun, irigasi yang baik hanya dibuat untuk sawah-sawah milik swasta asing dan pemerintah kolonial.

Emigrasi pun dilakukan untuk memindahkan warga Indonesia pada pulau-pulau di luar Jawa untuk membuka hutan-hutan baru. Pembukaan lahan baru ini untuk meningkatkan penghasilan yang didapatkan oleh Belanda dari pertanian maupun perkebunan.

3. Jabarkanlah penerapan program Politik Etis

a. Edukasi

Dari sisi edukasi, program politik etis memang tidak diperuntukkan bagi semua rakyat Indonesia. Umumnya Belanda memberikan sarana sekolah bagi para bangsawan, orang-orang Belanda maupun Eropa, dan orang-orang yang mungkin nantinya akan duduk di bagian pemerintahan daerah kolonial Belanda. Program politik etis ini membuka jalan bagi rakyat Indonesia untuk belajar. Walaupun, tetap ada diskriminasi pendidikan baik secara ras maupun status sosial, tetapi melalui program ini rakyat Indonesia bisa bersekolah. Salah satu contohnya adalah STOVIA, School tot Opleiding van Inlandsche Artsen yang menjadi tempat sekolah kedokteran. Sekolah itu lah yang banyak menghasilkan dokter-dokter handal dan aktivis-aktivis masa penjajahan yang melawan bangsa kolonial.

b. Irigasi

Sementara di bidang irigasi, kolonial Belanda membangun infrastruktur perairan bagi sawah-sawah. Namun, usaha ini masih dilakukan hanya untuk pertanian dari Bangsa Belanda sehingga terbentuknya ketimpangan antara sawah milik Belanda dan sawah milik orang Indonesia.

c. Emigrasi

Emigrasi atau transmigrasi yang dilakukan oleh Bangsa Belanda dilakukan bukan untuk meratakan penduduk-penduduk di kota, melainkan untuk membuka lahan baru. Banyak dari masyarakat di Jawa dimigrasikan ke Sumatera Utara, terutama Deli dan Suriname untuk menjadi kuli janji di perkebunan-perkebunan Belanda. Migrasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari tenaga kerja yang mudah, sehingga tidak sedikit orang yang merasa bahwa kondisinya tidak baik dan mencoba untuk kabur. Pemerintah Belanda pun mengimplementasikan sistem *Poenale Sanctie*, yaitu peraturan bahwa orang yang dimigrasikan akan dicari dan ditangkap oleh polisi jika hendak kabur. Setelah itu, polisi akan mengembalikan orang yang ditangkap itu pada mandor.

4. Warisan Program Politik Etis berpengaruh pada Indonesia

Hal pertama yang menjadi warisan program politik etis tentu adalah kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia lahir dari pemikir-pemikir handal yang mengetahui bahwa negara-negara lain di luar dapat merasakan kebebasan, tanpa memiliki penjajah yang dengan semena-mena mengatur kebijakan dan merampas harta. Pemikir-pemikir ini seperti Soekarno, Moh. Hatta, dan banyak pemikir sekaligus pemimpin bangsa lainnya datang dari sekolah-sekolah hasil politik etis itu. Oleh karenanya, edukasi yang dibangun oleh politik etis membantu masyarakat Indonesia untuk bisa memperoleh kemerdekaannya. Selain itu, edukasi juga menjadikan adanya institusi-institusi pendidikan yang sudah sejak lama ada di Indonesia. SMA Kolese Kanisius juga merupakan sekolah yang sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia dan menjadi warisan program politik etis.

Hal lainnya, di bidang imigrasi bangsa Belanda juga melahirkan sistem-sistem irigasi yang lebih baik. Contohnya adalah peraturan umum tata air atau *Het algemene water reglement* yang menyebabkan pertanian tetap bisa memiliki air yang cukup walaupun pada musim kemarau. Bangsa Belanda juga menerapkan pola tanam tertentu seperti pergiliran antara tanaman tebu dan palawija atau padi yang menyebabkan satu tanah bisa menghasilkan lebih banyak produk.

DAFTAR PUSTAKA

- DPU Kulon Progo. 2020. “Sejarah Irigasi di Indonesia”.
<https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/365/sejarah-irigasi-di-indonesia> (Diakses pada 1 Oktober 2022, 12.31)
- Kurniasih, Wida. “Pengertian Politik Etis: Program, Latar Belakang, dan Tokoh yang Terlibat”.
Jakarta: Gramedia. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-politik-etis/> (Diakses pada 1 Oktober 2022, 12.28)
- Santosa, Antonius T., Elisabeth R. M. “Modul Sejarah Kelas XI: Masuk dan Berkembangnya Kolonialisme di Indonesia”. Jakarta: Kanisius.
- Ucu, Karta R. 2017. “Politik Etis Ratu Wilhemina dan Tanam Paksa yang Menyiksa Pribumi”.
Republika.co.id.
<https://www.republika.co.id/berita/p07kvn282/politik-etis-ratu-wilhemina-dan-tanam-paksa-yang-menyiksa-pribumi>. (Diakses pada 1 Oktober 2022, 12.29)
- Universitas Krisnadwipayana. “Politik Etis”.
http://p2k.unkris.ac.id/id1/2-3065-2962/Politik-Etis_29393_p2k-unkris.html (Diakses pada 1 Oktober 2022, 12.30)